



Pelaksanaan Koordinasi Program Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal dan Manajemen Pembangunan Partisipatif serta Pengaruhnya terhadap Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan

Bambang Subagio

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Garut

Abstrak

The purpose of research to analyze the influence the objective of this research is to analyze the effect of the P3DT program and participative development management and its effect on the optimizing of community empowerment in relationship with development program in the Kabupaten Bandung.

This research was hoped show is there the influence of implementation coordination program P3DT and the participate development management to optimize of society empowering on the Bandung development. The magnitude of the influence showed by the two free variables to permanent variable got 47.4 percent. The partially testing indicate was know those every variable influencing with significant to optimize of society empowering on the Bandung development. This has been seen from the value of the variable by 40.44 percent. And management of participate development by 43.71 percent. Beside be hoped the positive correlation between the program coordination P3DT implementation with management of participate development

Kata kunci : Community empowerment; Participate development; Coordination;

1 Pendahuluan

Perkembangan dan pertumbuhan wilayah Kabupaten Bandung sampai saat ini nampak semakin meningkat, jika ditinjau dari aspek fisik daerah maupun perkembangan kegiatan sosial ekonomi, baik secara internal maupun eksternal. Namun demikian, karena berbagai faktor penyebab timbulnya kemiskinan, maka sampai saat ini masih terdapat penduduk Kabupaten Bandung yang berada di bawah garis kemiskinan.

Dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Program Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal (P3DT), maka sebagai pengelola program tersebut dibentuk Tim koordinasi pengelola program P3DT (TKPP-P3DT) mulai dari tingkat pusat, propinsi, kabupaten, kecamatan sampai desa. Adapun struktur organisasi TKPP-P3DT, sesuai surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 050/941/III/Bangda, tanggal 25 April 2000, tentang petunjuk pelaksanaan (juklak) P3DT, dan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bandung Nomor: 147/Kep-449A-Bapp/2000, tanggal 16 Agustus 2000, tentang TKPP-P3DT Kabupaten Bandung. Berdasarkan hasil evaluasi sementara (1999/2000), Pelaksanaan P3DT masih menghadapi berbagai permasalahan, sehingga proyek pembangunan gagal/belum dapat mencapai tujuan secara optimal.

Adapun tujuan penelitian ini, yaitu untuk mendapatkan data/informasi yang dapat dipakai untuk menguji pengaruh pelaksanaan koordinasi program P3DT dan manajemen pembangunan partisipatif terhadap optimalisasi pembangunan masyarakat dalam pembangunan.

2 Kajian Teori

Beberapa teori yang relevan untuk menerangkan, dan menunjukkan perspektif terhadap masalah dalam penelitian ini adalah ilmu administrasi negara sebagai *grand theory*, ilmu kebijakan publik sebagai *middle range theory*, serta sebagai *operational theory* adalah teori manajemen pembangunan partisipatif dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut Thoha (1997), sebagian besar persoalan administrasi negara adalah bersumber dari persoalan masyarakat. Administrasi negara merupakan sistem yang menjawab persoalan-persoalan masyarakat tersebut. Caiden (1982) dalam Thoha (1997) menandakan, bahwa disiplin administrasi negara ini pada hakekatnya adalah suatu disiplin yang menanggapi masalah masalah pelaksanaan persoalan-persoalan masyarakat (*public affairs*), dan management dari usaha usaha masyarakat (*public business*).

Salah satu persoalan dalam beberapa paradigma administrasi negara menurut Thoha (1997), ialah adanya usaha untuk membedakan antara negara dalam istilah administrasi negara dengan swasta atau perusahaan. Penggunaan istilah negara dalam administrasi negara terkesan tidak bisa mencampuri urusan-urusan swasta.

Gullick dalam Siagian (1998) dan Ma'moeri (1999) menyatakan bahwa salah satu unsur penting dalam pelayanan adalah koordinasi. Dalam hal ini, Ma'moeri (1999) menyatakan bahwa koordinasi memiliki pengertian:

- a Koordinasi adalah usaha menyatukan kegiatan-kegiatan dari satuan-satuan (unit-unit) organisasi, sehingga organisasi bergerak sebagai satu kesatuan yang bulat, guna melaksanakan seluruh tugas organisasi untuk mencapai tujuan;
- b Koordinasi adalah penyatupaduan gerak dari seluruh potensi dan organisasi-organisasi yang berbeda fungsi agar benar-benar mengarah ke sasaran yang sama, guna memudahkan pencapaian tujuan organisasi dengan efisien;
- c Koordinasi adalah memadukan serta menyerasikan dan menyelaraskan berbagai kepentingan dan kegiatan beserta segenap langkah dan waktunya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran bersama yang akan dicapai;
- d Koordinasi adalah suatu proses kegiatan yang menyelaraskan berbagai kegiatan yang berbeda-beda, akan tetapi mempunyai tujuan yang berhubungan, sehingga terdapat keterarahan dan keterpaduan dalam kegiatan pencapaian tujuan bersama.

Lebih lanjut Winarno (1999) menyatakan bahwa tujuan koordinasi adalah:

- a Memastikan adanya kesatuan gerak dalam organisasi;
- b Saling berkomunikasi dan bantu membantu antar unit;
- c Menjamin kesatuan kebijaksanaan untuk hal-hal yang sama;
- d Menghindarkan kecenderungan merasa "paling penting" dalam organisasi.

Adapun partisipasi masyarakat menurut Soelaiman (1996) adalah adalah keterlibatan aktif warga masyarakat baik secara perorangan, kelompok, ataupun dalam kesatuan masyarakat dalam bentuk proses pembuatan keputusan bersama, perencanaan, pelaksanaan program, pelaksanaan sosial,

dan pembangunan masyarakat yang dilaksanakan di dalam maupun di luar lingkungan masyarakat atas dasar rasa kesadaran dan tanggungjawab sosialnya.

Pemberdayaan masyarakat, menurut Sumodiningrat (1999) adalah kemampuan individu yang bersenyawa dalam masyarakat dan membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan. Masyarakat dengan keberdayaan yang tinggi adalah masyarakat yang sebagian besar anggotanya sehat fisik dan mental, terdidik dan kuat, dan memiliki nilai-nilai intrinsik yang juga menjadi sumber keberdayaan seperti kekeluargaan, kegotongroyongan, dan bagi masyarakat kita adalah kebhinekaan.

Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu, organisasi serta pemerintah untuk mencapai peningkatan kesejahteraan rakyat. Kebijakan adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau kelompok guna memecahkan suatu masalah tertentu. Kebijakan publik menjadi penting dalam organisasi, karena mengangkat kepentingan tujuan orang banyak dan kelangsungan hidup suatu organisasi atau negara. Setiap kebijakan akan mengarah kepada tindakan-tindakan yang dilakukan organisasi atau negara di masa yang akan datang (Supriatna, 1999).

Pada hakekatnya perencanaan adalah usaha yang secara sadar, terorganisasi terus menerus yang dilakukan guna memilih alternatif yang terbaik dari sejumlah alternatif untuk mencapai tujuan tertentu (Conyer, 1994). Pada sisi yang lain, perencanaan merupakan penerapan secara rasional dari pengetahuan manusia terhadap proses pencapaian keputusan yang bertindak sebagai dasar perilaku manusia. Dalam konteks pembangunan, perencanaan merupakan tugas pokok dalam administrasi atau manajemen pembangunan.

3 Metode Penelitian

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode eksplanatoris dan survey deskriptif. Soehartono (1998:33) menjelaskan bahwa metode eksplanatoris adalah suatu penelitian yang mempunyai tujuan untuk menguji hipotesis yang menyatakan hubungan sebab-akibat antara dua variabel atau lebih dengan bias relatif kecil dan meningkatkan kepercayaan, sementara survey deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat dengan tujuan untuk membuat gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sebab-sebab serta hubungan antar fenomena yang diteliti.

Berdasarkan identifikasi masalah dan kerangka pemikiran sebagaimana tersebut di atas, maka hipotesis utama yang akan diteliti, yaitu pengaruh pelaksanaan koordinasi program pembangunan prasarana pendukung desa tertinggal dan manajemen pembangunan partisipatif terhadap optimalisasi pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di Kabupaten Bandung.

Hipotesis utama penelitian diturunkan menjadi 3 (tiga) hipotesis kerja (sub-hipotesis) sebagai berikut:

1. Pelaksanaan koordinasi program pembangunan prasarana pendukung desa tertinggal berpengaruh terhadap optimalisasi pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan,
2. Manajemen pembangunan partisipatif berpengaruh terhadap optimalisasi pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan.
3. Pelaksanaan koordinasi program pembangunan prasarana pendukung desa tertinggal memiliki korelasi dengan manajemen pembangunan partisipatif.

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu:

1. Observasi, dengan melakukan pengamatan langsung dilapangan untuk mengumpulkan data/informasi yang relevan dengan penelitian.
2. Angket, yaitu pengumpulan data langsung dengan menyebarkan daftar pertanyaan tertulis untuk dijawab langsung oleh responden untuk memperoleh keterangan untuk mendapat responden mengenai aspek aspek yang diteliti.
3. Studi kepustakaan, yaitu merupakan kajian terhadap buku buku atau karya tulis ilmiah/makalah/tesis, dan literatur lain yang relevan dengan penelitian ini, sehingga dapat menjadi dasar acuan dalam kerangka teori untuk menjelaskan variabel yang diteliti dan memberikan wawasan keilmuan.
4. Dokumentasi yaitu pengumpulan data/informasi dalam bentuk catatan, laporan, pedoman umum/juklak/juknis dari dinas/instansi, peraturan peraturan, jurnal, dan informasi lainnya yang sesuai dengan penelitian.

Sedangkan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis jalur (*path analysis*).

4 Hasil dan Implikasi

Hasil pengujian menunjukkan bahwa F_{hitung} yang diperoleh lebih besar dari F_{tabel} , yaitu $F_{hitung} = 40,7466$ dan F_{tabel} dengan $\alpha 0,05 = 3,09$. Hal ini berarti bahwa variabel pelaksanaan koordinasi program P3DT (X_1) dan manajemen pembangunan partisipatif (X_2) secara simultan (bersama-sama) berpengaruh terhadap optimalisasi pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan (Y).

Signifikansi nilai di atas didukung pula oleh besaran nilai koefisien determinasi ($R^2_{yx1.x2}$) sebesar 0.4724 Nilai ini menunjukkan bahwa optimalisasi pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan (Y) dipengaruhi oleh pelaksanaan koordinasi program P3DT (X_1) dan manajemen pembangunan partisipatif (X_2) sebesar 47,24%, sedangkan sisanya ($P_{y\epsilon}$)² sebesar 52,76% dipengaruhi oleh variabel lain.

Secara parsial, hipotesis penelitiannya adalah: (1) pelaksanaan koordinasi program P3DT memberikan pengaruh terhadap optimalisasi pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, dan (2) manajemen pembangunan partisipatif memberikan pengaruh terhadap optimalisasi pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan. Sebagai pembuktian terhadap hipotesis tersebut, telah dilakukan pengujian secara individu melalui uji t-student. Hasil pengujian hipotesis tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.

Variabel pelaksanaan koordinasi program P3DT (X_1) memiliki nilai t_{hitung} yang lebih besar dari t_{tabel} , artinya bahwa secara parsial, pelaksanaan koordinasi program P3DT (X_1) memberikan pengaruh secara nyata terhadap optimalisasi pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan (Y) dan manajemen pembangunan partisipatif juga (X_2) berpengaruh secara nyata terhadap optimalisasi pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan (Y) yang ditunjukkan dengan nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} .

Tabel 1. Hasil Koefisien jalur X_1 dan X_2 terhadap Y secara parsial

Jalur	Nilai koefisien jalur	t_{hitung}	t_{tabel} ($\alpha=0.025$)	Keputusan	Kesimpulan
P_{YX_1}	0.4044	5,6357	2.00	H_0 ditolak	Signifikan
P_{YX_2}	0.4371	6,0922	2.00	H_0 ditolak	Signifikan

Rumusan hipotesis yang diajukan adalah terdapat hubungan/korelasi antara pelaksanaan koordinasi program P3DT (X_1) dan manajemen pembangunan partisipatif (X_2). Untuk menjawab hipotesis tersebut dilakukan pengujian dengan menggunakan korelasi *product moment* dari Pearson. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai koefisien korelasi parsial sebesar 0.3333 dengan sifat hubungan berkorelasi positif.

Untuk mengetahui lebih lanjut keterkaitan antara variable X_1 dan X_2 dilakukan pengujian dengan membandingkan antara nilai t_{hitung} dengan t_{tabel} . Berdasarkan pengujian diperoleh bahwa t_{hitung} lebih besar dibandingkan dengan nilai t_{tabel} , yaitu $t_{hitung} = 3,3913 > t_{tabel} = 2.00$. Dari nilai tersebut diperoleh keputusan H_0 ditolak, sehingga kedua variabel tersebut, yaitu pelaksanaan koordinasi program P3DT (X_1) dan manajemen pembangunan partisipatif (X_2) memiliki keeratan hubungan yang cukup tinggi di antara satu sama lainnya.

5 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dikemukakan terlihat bahwa optimalisasi pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan dipengaruhi oleh pelaksanaan koordinasi program P3DT dan manajemen pembangunan partisipatif secara simultan sebesar 47,24%.

Optimalisasi pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan dipengaruhi cukup besar oleh pelaksanaan koordinasi program P3DT dan manajemen pembangunan partisipatif. Dengan demikian, kecenderungan semakin baik pelaksanaan koordinasi program P3DT dan manajemen pembangunan partisipatif memberikan peluang yang cukup besar bagi tercapainya optimalisasi pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan yang lebih baik.

Daftar Pustaka

- Conyer, D. 1994. Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga: FISIP UGM, Yogyakarta
- Iskandar, Jusman, 2006/a, Kapita Selekta Administrasi Negara. Puspaga, Bandung.
- Iskandar, Jusman, 2006/b, Pembangunan Sosial dan Model Indikator Pembangunan Sosial, LPPM Program Pascasarjana Universitas Garut.
- Iskandar, Jusman. 2004. Manajemen Publik. Program Pascarsarjana Universitas Garut.
- Soehartono, I. 1998. Metode Penelitian Sosial; Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Supriatna, T. 1999. Pengantar Administrasi Pembangunan. LP3ES, Jakarta.
- Thoha, M. 1997. Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara. PT Raja Grafindopersada, Jakarta.